KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI
http://kliping.dpr.go.id

Judul : Kebebasan berpendapat: rapat tertutup, DPR dan BIN bahas demo agustus
Tanggal : Kamis, 04 Desember 2025
Surat Kabar : Kompas
Halaman : 2

KEBEBASAN BERPENDAPAT

Rapat Tertutup, DPR dan BIN Bahas Demo Agustus

JAKARTA, KOMPAS — Dewan Perwakilan Rakyat bersama Badan Intelijen Negara, Badan Intelijen Strategis TNI, dan Badan Intelijen Keamanan Polri melakukan pertemuan tertutup di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (3/12/2025). Dalam rapat tersebut disinggung terkait kerusuhan yang mewarnai rangkaian aksi unjuk rasa besar-besaran pada akhir Agustus lalu.

Ketua Komisi I DPR Utut Adianto menyatakan, rapat tersebut dipimpin oleh Wakil Ketua DPR dari Fraksi Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad. Utut tidak menjelaskan lebih lanjut terkait pembahasan rapat itu. Namun, menyinggung aksi unjuk rasa pada Agustus 2025 lalu yang menjadi sorotan agar tidak terulang kembali.

"Datang semua, Kepala BIN, Kepala Bais TNI, Kabaintelkam (Polri), para Sestama (Sekretaris Utama). Masukan banyak. Hasilnya perbaikan, supaya keadaan Agustus tidak terulang lagi," ungkap politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) itu seusai rapat tertutup.

Berdasarkan pengamatan *Kompas*, Dasco memasuki ruang rapat tersebut sekitar pukul 11.00 WIB dan keluar sekitar pukul 12.30 WIB. Tidak lama kemudian, para jajaran pimpinan lembaga juga keluar dari ruang rapat. Namun, baik Dasco maupun perwakilan lembaga memilih tidak menjawab pertanyaan wartawan.

Saat diminta pendapatnya mengenai pertemuan DPR dengan beberapa lembaga intelijen, Koordinator Eksekutif Indonesia Intelligence Institute Ridlwan Habib menyampaikan bahwa pembahasan secara tertutup ini tidak hanya sekadar mengukur besaran unjuk rasa yang terjadi. Namun, ada isu keamanan di dalamnya, mulai dari kerusuhan hingga dinamika di lapangan yang berkaitan dengan operasi intelijen.

"Menurut saya, bukan soal unjuk rasa yang jadi perhatian komunitas intelijen, tetapi kerusuhan yang terjadi di berbagai kota. Termasuk dinamika isu di media sosial saat itu yang menyebutkan ada oknum institusi yang terlibat dan friksi lapangan TNI-Polri," paparnya.

Ridlwan berujar, rangkaian aksi unjuk rasa yang berujung kerusuhan tersebut seharusnya bisa dicegah dengan cara kolaboratif dan deteksi dini yang disiapkan sebelumnya.

"Fungsi deteksi dini idealnya juga bukan temporer atau instan dadakan, melainkan disiapkan jauh-jauh hari. Bahkan, prediksi ancaman 2026 semestinya sudah ada dari sekarang. BIN dan lembaga intelijen lain juga mesti waspada terhadap ancaman nontradisional, seperti mitigasi bencana alam karena cuaca atau siklon," papar Ridlwan.

Menaruh kekhawatiran

Sementara itu, peneliti dari Departemen Politik dan Perubahan Sosial Centre for Strategic and International Studies (CSIS), Dominique Nicky Fahrizal, menaruh kekhawatiran terhadap pertemuan DPR dengan beberapa lembaga intelijen tersebut. Menurut dia, pertemuan itu dapat memunculkan anggapan bahwa aksi unjuk rasa sebagai gangguan keamanan daripada wujud kebebasan berpendapat dari warga negara.

"Unjuk rasa ini bisa dilihat dari dua sudut pandang. Masyarakat sipil melihat kerusuhan sebagai buntutnya komunikasi politik, lalu aparat tidak bisa mengelola amarah masyarakat. Di sisi lain, pemegang otoritas melihat ini sebagai isu keamanan, bahwa ini adalah ancaman," ujar Nicky.

"Saya khawatirnya, perbedaan ini, apabila gagal didalami dengan baik, maka setiap kali ada unjuk rasa langsung dipandang sebagai ancaman keamanan. Ini yang menurut saya berbahaya," lanjut Nicky.

Menurut Nicky, hal ini semakin diperuncing dengan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang cenderung mementingkan aspek stabilitas keamanan.

"Jadi, enggak heran kalau dikumpulkan (lembaga intelijen) dan isu yang keluar soal keamanan akibat pasca-kerusuhan itu, ya," ujarnya.

Nicky berpendapat, dalam pertemuan tertutup itu semestinya DPR memetakan akar masalah dari kerusuhan yang ada. Sebagai wakil rakyat, DPR juga harus menempatkan posisinya untuk memberikan gambaran utuh kepada institusi keamanan dan intelijen agar melihat unjuk rasa tidak hanya terkait masalah keamanan.

Nicky menyoroti salah satu akar masalah dari penyebab unjuk rasa, yakni tersumbatnya saluran komunikasi publik yang dianggap rakyat sebagai bentuk pengabaian terhadap aspirasi mereka. Apalagi, unjuk rasa tersebut menelan korban jiwa sehingga memicu amarah publik.

"Menurut saya, DPR dalam pertemuan tertutup itu, ya, seharusnya mewakili kepentingan dan aspirasi masyarakat. DPR seharusnya lebih memberikan penjelasan, gambaran utuh bahwa aparat keamanan harusnya melihat unjuk rasa terjadi karena permasalahan yang sebenarnya tidak selesai, yaitu tersumbatnya komunikasi politik," kata Nicky.

(RTG/BOW)